



## **DAMPAK TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN**

**Irgi Auzandika<sup>1</sup>; Risma Nurfansyah<sup>2</sup>**

<sup>1,3</sup>*Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia*

<sup>2</sup>*Kehutanan, Universitas Institute Pertanian Stiper, Indonesia*

<sup>1</sup>*Correspondence Email: [auzandikai@gmail.com](mailto:auzandikai@gmail.com)*

**Received:** 19 November 2024

**Accepted:** 28 November 2024

**Published:** 30 Desember 2024

---

### **Abstract**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tata kelola bantuan sosial dan transparansi anggaran terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yang dilakukan melalui identifikasi, evaluasi, dan interpretasi sistematis terhadap literatur ilmiah relevan dalam lima tahun terakhir. Sumber data diperoleh dari database Dimensions dan Scopus, dengan kriteria seleksi yang memastikan keterkinian dan relevansi terhadap topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas program bantuan sosial di perkotaan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, akuntabilitas fiskal, dan kapasitas kelembagaan lokal. Ketimpangan struktural, kelemahan dalam penargetan, dan keterbatasan regulasi menjadi penghambat utama keberhasilan program. Di sisi lain, transparansi anggaran terbukti mendorong partisipasi publik, mengurangi potensi korupsi, serta memperkuat akuntabilitas sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara tata kelola yang inklusif, pemanfaatan data demografis, dan inovasi teknologi berbasis konteks lokal. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi perumusan kebijakan sosial yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam konteks urban.*

**Keywords:** *Tata Kelola Bantuan Sosial, Transparansi Anggaran, Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan*

---

## **A. Pendahuluan**

Tata kelola bantuan sosial merupakan seperangkat prinsip, mekanisme, dan institusi yang mengatur proses perencanaan, distribusi, dan evaluasi program bantuan kepada kelompok rentan. Tata kelola yang baik dalam konteks ini mencakup kejelasan regulasi, akuntabilitas aktor, penargetan berbasis data, dan integritas pelaksanaan. Dalam praktiknya, tata kelola bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas intervensi negara dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat miskin. Sementara itu, transparansi anggaran merujuk pada sejauh mana informasi mengenai perencanaan, alokasi, dan realisasi anggaran dapat diakses dan dipahami oleh publik. Transparansi menjadi prasyarat penting untuk mendorong partisipasi warga, memperkuat kontrol sosial, serta mengurangi risiko penyalahgunaan sumber daya publik dalam program sosial. Kedua variabel ini saling berkelindan dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan intervensi pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan yang kompleks dan dinamis.

Efektivitas penanggulangan kemiskinan dalam konteks perkotaan tidak hanya ditentukan oleh besar anggaran atau jumlah program yang dijalankan, tetapi lebih pada kecocokan strategi intervensi dengan kompleksitas karakteristik kemiskinan kota. Lingkungan urban ditandai oleh kemajemukan sosial, ketimpangan spasial, dan akses yang tidak merata terhadap layanan dasar, sehingga intervensi konvensional cenderung kurang responsif. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dari sejauh mana program mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat miskin kota, memperluas cakupan layanan, mengurangi hambatan struktural, serta membangun mekanisme adaptif berbasis bukti. Dalam kerangka ini, tata kelola dan transparansi bukan sekadar elemen administratif, melainkan fondasi dari pendekatan intervensi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam tata kelola distribusi bantuan sosial tercermin dalam berbagai studi yang menunjukkan bahwa ketimpangan struktural, manajemen yang lemah, dan kesalahan penargetan masih menjadi

kendala utama. Misalnya, di wilayah Daerah Otonomi Etnis di Tiongkok, kesenjangan fiskal antar daerah telah menyebabkan distribusi pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata, dengan wilayah Tibet memperoleh perlakuan istimewa dibanding wilayah ETAA lainnya (Zhao, 2023). Di Indonesia, pendekatan distribusi bansos masih konvensional dan kurang berbasis data, menyebabkan salah alokasi dan keterbatasan jangkauan terhadap kelompok yang benar-benar membutuhkan (Erlangga & Reswan, 2022). Studi di Kota Bekasi juga menunjukkan implementasi regulasi kesejahteraan sosial yang tidak sistematis, dengan banyak penerima tidak tepat sasaran dan rendahnya kapasitas penjangkauan (Supriyatno & Maulana, 2022). Fenomena serupa terjadi di Brasil, di mana desentralisasi bantuan sosial menghadapi kendala pembiayaan dan pengeluaran yang salah sasaran, yang mereduksi manfaat dari program bantuan terpadu (Oliveira et al. 2023). Selain itu, sistem kesejahteraan yang lemah sering kali mendorong munculnya praktik informal karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara dalam menyediakan perlindungan sosial yang memadai (Berens, 2020). Meskipun demikian, beberapa literatur menyatakan bahwa desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan responsivitas kebijakan lokal terhadap kebutuhan warga miskin, asalkan hambatan struktural diatasi secara menyeluruh.

Transparansi anggaran memiliki posisi strategis dalam meningkatkan akuntabilitas program bantuan sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi fiskal dapat mendorong partisipasi warga, memperkuat pengawasan publik, serta menekan tingkat korupsi (Fenuku, 2024). Mencatat bahwa partisipasi publik dalam proses penganggaran menjadi lebih efektif ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat. Transparansi dalam program bantuan sosial sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Studi ini menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang jelas tentang syarat penerima, pemetaan dana, serta cara pembagian agar dana bantuan sampai kepada mereka yang berhak (Fardi et al., 2023). Platform digital yang menyediakan data anggaran secara

terbuka memungkinkan warga memantau pelaksanaan program dan melaporkan penyimpangan (Naik et al., 2024). Di Korea Selatan, pengenalan sistem anggaran terbuka telah menurunkan inefisiensi fiskal, membuktikan bahwa keterbukaan dapat memperbaiki masalah agensi dalam tata kelola publik (Jung, 2022). Selain itu, peningkatan transparansi anggaran diyakini menumbuhkan kepercayaan warga terhadap otoritas lokal dan memperkuat swasembada keuangan komunitas (Bogdan, 2022). Dalam konteks sektor pendidikan, Astuti & Sutirman (2024), menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana berkorelasi positif dengan peningkatan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, efektivitas transparansi tetap dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan seperti kapasitas teknis birokrasi dan intervensi politik, sehingga tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk masalah akuntabilitas.

Kemiskinan memberikan efek buruk yang mengancam kesejahteraan masyarakat termasuk penurunan kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, serta pengangguran. Kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah permasalahan yang membahayakan kesejahteraan masyarakat, seperti kurangnya akses pendidikan, kondisi kesehatan yang kurang baik, pendapatan yang rendah, serta tingkat pengangguran yang tinggi (Mardiah et al., 2024). Meskipun program pengentasan kemiskinan telah mengalami kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, berbagai literatur menyoroti keterbatasan capaian terutama di lingkungan perkotaan (Goba et al., 2022). Kondisi kemiskinan di Kota Mataram juga masih nampak dari terbatasnya peluang kerja. Oleh karena itu, berbagai strategi digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya, warga yang sebelumnya bekerja sebagai buruh bangunan kini beralih menjadi penambang pasir. Masyarakat akan melakukan segala cara untuk mencukupi kebutuhan mereka. Terlebih lagi dengan situasi kerja saat ini yang cukup sulit di tengah pandemi Covid-19 (Pratama et al., 2023). Mencatat bahwa program seperti bantuan pangan dan tunai masih bersifat parsial dan gagal mencakup seluruh dimensi kemiskinan, seperti kerentanan struktural dan keterbatasan akses. Di Tiongkok, intervensi

yang berhasil menurunkan kesenjangan pendapatan antara Kota dan Desa belum mampu menghapus kemiskinan relatif secara menyeluruh, menandakan kebutuhan akan kebijakan jangka panjang yang lebih adaptif (Yang et al., 2022). Efektivitas program juga sangat bergantung pada kondisi makroekonomi; misalnya, program bantuan lebih efektif dalam periode pertumbuhan ekonomi dibanding krisis (Simangunsong & Sihotang, 2023).

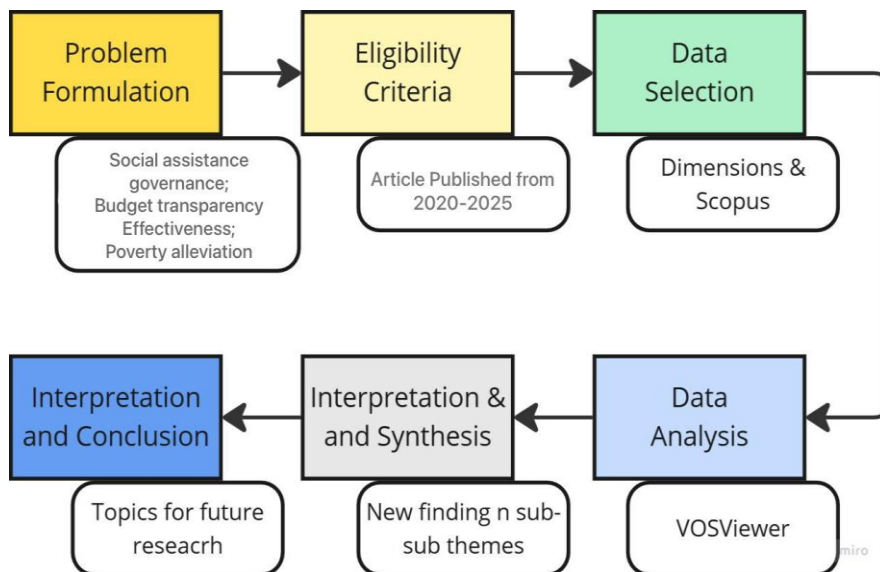
Mereka juga menunjukkan bahwa intervensi berbasis demografi, seperti untuk anak-anak dan keluarga orang tua tunggal, menghasilkan dampak nyata jika disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tersebut. Lebih jauh, (Wilson et al., 2022) menyatakan bahwa pengurangan ketimpangan spasial di perkotaan cenderung lebih efektif daripada sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi umum. Salah satu faktor yang jarang diperbincangkan terkait kemiskinan adalah bencana alam atau penyebaran penyakit. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona telah memberikan dampak besar bagi Kota Mataram sejak akhir tahun 2019 (Pratama, 2023). Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam merespons perubahan konteks dan menjamin keadilan hasil. Meski demikian, terdapat kritik bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada target individu justru dapat mengabaikan persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju desain kebijakan yang mengintegrasikan reformasi kelembagaan dan keadilan sosial sebagai inti dari strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Model ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh hasil penelitian yang relevan mengenai Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Model ini bertujuan untuk mengumpulkan dan

menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 5 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan ialah data terkini dan relevan dengan Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



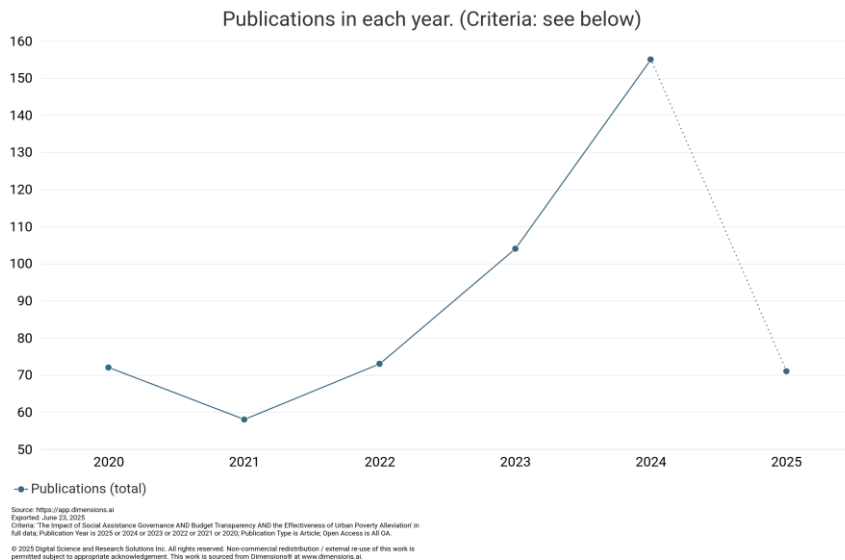
### **Gambar 1.** Prosedur penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti (Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) or (The Impact of Social Assistance Governance and Budget Transparency and the Effectiveness of Urban Poverty Alleviation) Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Hasil Seleksi Data**

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 47,597 data, meliputi data *open access* sebanyak 6,569 data dan sisanya adalah *close access*. 6,569 data tersebut, terdapat 2,142 data merupakan artikel dan 4,427 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 533 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



**Gambar 2.** Distribusi jumlah data selama 5 tahun terakhir

Gambar 2 menunjukkan bahwa Gambar tersebut merupakan grafik garis yang menunjukkan jumlah publikasi per tahun terkait topic “The Impact of Social Assistance Governance and Budget Transparency on the Effectiveness of Urban Poverty Alleviation” berdasarkan data dari Dimensions.ai, dengan jenis publikasi adalah artikel dan akses terbuka (Open Access). Berikut penjelasan rinci:

Penjelasan Grafik Sumbu X (Horizontal): Mewakili tahun publikasi, dari tahun 2020 hingga 2025. Sumbu Y (Vertikal): Menampilkan jumlah total publikasi, dengan skala dari 60 hingga 180. Data Per Tahun: 2020: Sekitar 72 publikasi, 2021: Sekitar 58 publikasi, 2022: Sekitar 73 publikasi, 2023: Sekitar 104 publikasi, 2024: Sekitar 155 publikasi (puncak tertinggi), 2025: Sekitar 71 publikasi (turun drastis).

#### **Garis Putus-Putus ke 2025:**

Menunjukkan bahwa data tahun 2025 belum lengkap (karena grafik diekspor pada Juni 2025). Artinya, publikasi tahun 2025 kemungkinan belum sepenuhnya terakumulasi.



**Makna dan Implikasi****Tren Kenaikan (2020–2024):**

Menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap dampak tata kelola bantuan sosial dan transparansi anggaran terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Kenaikan ini mencerminkan urgensi global dalam menata ulang sistem distribusi bantuan sosial secara lebih adil, transparan, dan akuntabel, khususnya di tengah dinamika urbanisasi dan ketimpangan sosial pasca-pandemi.

**Penurunan Sementara (2021):**

Terjadi penurunan jumlah publikasi pada tahun 2021, yang kemungkinan disebabkan oleh pergeseran fokus riset global akibat krisis COVID-19, di mana perhatian lebih banyak diarahkan pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal ini juga dapat mengindikasikan adanya keterbatasan akses data dan hambatan penelitian lapangan selama pandemi berlangsung.

**Lonjakan Signifikan (2023–2024):**

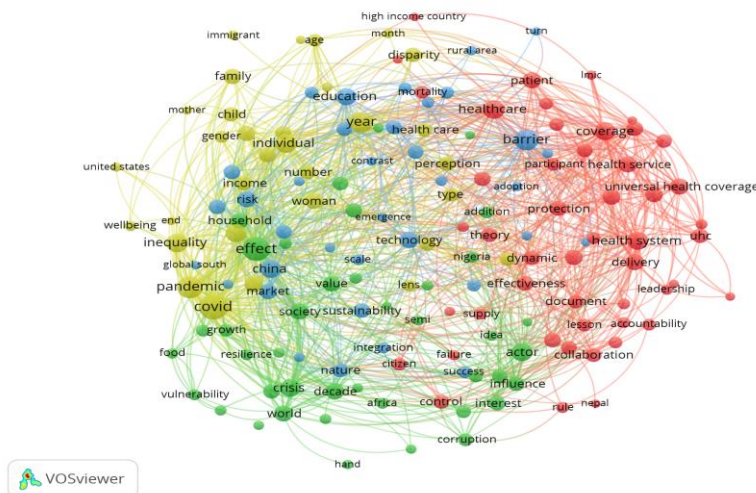
Kenaikan tajam dalam dua tahun terakhir menandakan berkembangnya kesadaran ilmiah dan kebijakan mengenai pentingnya reformasi tata kelola sosial berbasis bukti. Hal ini juga menunjukkan peningkatan penggunaan teknologi informasi, data terbuka, dan dorongan terhadap kebijakan berbasis transparansi dalam distribusi bantuan sosial di kawasan perkotaan.

**Penurunan Tajam di 2025:**

Bukan disebabkan oleh berkurangnya ketertarikan, tetapi karena tahun 2025 belum berakhir, sehingga publikasi masih belum sepenuhnya terdaftar. Umumnya, informasi akan terus bertambah seiring berjalannya waktu hingga akhir tahun.

**2. Network Visualization of Data**

Data yang telah menjalani proses pemilihan kemudian divisahkan dengan memanfaatkan VOSviewer untuk mengamati variabel-variabel penelitian serta keterkaitan antar variabel tersebut. Hasil dari visualisasi ditampilkan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variabel yang dipelajari selama 5 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi setiap variabel adalah sebagai berikut.

a. Green Cluster (Krisis, Ketahanan Sosial, dan Tata Kelola Global)

**Kata kunci utama:**

Crisis, resilience, corruption, actor, control, integration, failure, success, governance, influence, rule, dan interest.

Klaster ini berfokus pada dimensi tata kelola sosial dalam menghadapi krisis, dengan penekanan pada aktor kebijakan, korupsi, pengaruh, dan peran institusi dalam menciptakan ketahanan sosial. Hal ini sangat penting dalam menilai efektivitas bantuan sosial dalam kondisi ketidakpastian seperti pandemi atau bencana sosial-politik.

b. Blue Cluster (Teknologi, Pendidikan, dan Persepsi Efektivitas)

**Kata kunci penting:**

Education, technology, perception, type, theory, dynamic, effectiveness, dan emergence.

Klaster ini berkaitan dengan bagaimana teknologi dan pendidikan membentuk persepsi terhadap efektivitas program intervensi (termasuk bantuan sosial), serta aspek teoritis dan dinamika perubahan sosial. Klaster ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penerima memaknai efektivitas bantuan.

c. Red Cluster (Health Governance & Universal Health Coverage (UHC))

**Kata kunci penting:**

Health system, universal health coverage, barrier, coverage, delivery, patient, accountability, leadership, dan collaboration.

Klaster ini membahas isu-isu seputar tata kelola sistem kesehatan, hambatan akses pelayanan kesehatan, serta upaya pencapaian UHC (Universal Health Coverage). Terdapat juga dimensi akuntabilitas, kolaborasi, dan kepemimpinan yang mengarah pada efektivitas sistem dalam menjangkau kelompok rentan. Ini relevan dalam konteks bantuan sosial yang sering terintegrasi dengan layanan kesehatan.

d. Yellow Cluster (Ketimpangan, Risiko Sosial, dan Demografi)

**Kata kunci penting:**

Income, inequality, vulnerability, household, gender, age, family, immigrant, risk, food, dan wellbeing. Klaster ini menunjukkan fokus pada karakteristik demografis penerima bantuan sosial, serta dimensi kerentanan dan ketimpangan sosial. Sangat relevan dalam mengidentifikasi kelompok miskin di perkotaan serta menilai efektivitas bantuan berdasarkan profil sosial.

Berdasarkan pembagian klaster, peneliti dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut.

a. **Tata Kelola dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial**

Distribusi bantuan sosial merupakan proses yang kompleks, di mana dinamika interaksi antara aktor dan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan ideologi yang mendasarinya. Dalam konteks ini, ketimpangan kekuasaan kerap terjadi, terutama terkait isu gender, di mana perempuan sering kali tidak terlibat secara memadai dalam proses pengambilan keputusan, meskipun mereka menjadi kelompok yang paling terdampak oleh krisis (Potts, 2024). Pergeseran peran dari aktor negara menuju keterlibatan LSM dan sektor swasta juga menimbulkan tantangan dalam akuntabilitas dan pengawasan distribusi bantuan (Fergus, 2022). Selain itu, ideologi donor turut menentukan arah distribusi, di mana preferensi terhadap mitra negara atau non-negara dipengaruhi oleh pendekatan statistik atau neoliberal, yang sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan lokal (Sahin & Shahin, 2020). Teori jaringan aktor menegaskan bahwa keberhasilan distribusi tidak hanya

bergantung pada sumber daya finansial, tetapi juga pada kemampuan kolaborasi dan negosiasi di antara aktor-aktor yang terlibat (Sela et al., 2020).

Di sisi lain, prinsip transparansi dan akuntabilitas terbukti memainkan peran penting dalam peningkatan efektivitas tata kelola organisasi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun dalam konteks kelembagaan. Peningkatan transparansi mendorong efisiensi pengelolaan anggaran dan membangun kepercayaan publik, dua aspek yang krusial dalam tata kelola yang baik (Fathirah et al., 2024) (Setia et al., 2020) (Salihi et al., 2023). Dalam lingkup organisasi, budaya transparansi dan akuntabilitas meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, serta memperkuat keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mendukung program-program kelembagaan (Wiswadas et al., 2023). Bahkan pada tataran desa, partisipasi masyarakat yang dikombinasikan dengan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel terbukti berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana publik (Cahyandari et al., 2024).

Interpretasi dari temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari dinamika aktor, kekuasaan, serta kerangka kelembagaan yang melingkupinya. Ketika struktur kekuasaan tidak seimbang, distribusi bantuan rentan terhadap bias dan marginalisasi kelompok tertentu. Di sisi lain, ketika sistem tata kelola didesain dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, maka distribusi bantuan sosial dapat lebih responsif, inklusif, dan efisien. Oleh karena itu, integrasi prinsip tata kelola yang baik serta pemahaman terhadap jaringan aktor dan pengaruh ideologi donor menjadi kunci strategis dalam membangun sistem distribusi bantuan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **b. Ketimpangan Sosial dan Karakteristik Penerima Bantuan di Perkotaan**

Interaksi antara jenis kelamin, usia, dan struktur rumah tangga memainkan peran penting dalam membentuk tingkat kerentanan individu terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan lansia, khususnya yang hidup

sendiri, lebih rentan terhadap kemiskinan karena keterbatasan pendapatan seumur hidup dan beban peran pengasuhan yang pernah mereka emban (Ahonen & Kuivalainen, 2024). Dalam konteks krisis kemanusiaan, rumah tangga yang dikepalai perempuan, seperti di kalangan pengungsi Rohingya, menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi, memperjelas pentingnya faktor gender dan struktur rumah tangga dalam situasi rentan (Nasar et al., 2022). Usia juga menjadi faktor penentu penting, di mana individu muda (18–40 tahun) lebih rentan akibat kurangnya mekanisme koping dan ketidakstabilan sosial ekonomi (van der Meer et al., 2022), sementara lansia menghadapi resiko kesehatan mental yang tinggi terkait kondisi tempat tinggal (Lee, 2024). Komposisi rumah tangga yang melibatkan lansia atau penyandang disabilitas turut memperparah kerentanan ekonomi dan sosial (Nasar et al., 2022).

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan menunjukkan korelasi negatif dengan akses terhadap layanan dasar, termasuk layanan keuangan dan pelayanan publik. Individu dengan pendapatan lebih rendah tidak hanya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga mengalami waktu tunggu yang lebih lama dalam menerima layanan, yaitu rata-rata 12 menit lebih lama dibandingkan individu berpenghasilan tinggi (Fu & Liu, 2023) (Holt & Vinopal, 2023). Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari. Beberapa upaya kebijakan seperti Universal Basic Income (UBI) telah diajukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks sosial dan ekonomi setempat (Angelov, 2023) (Láin, 2022). Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan interseksionalitas dan kebutuhan spesifik kelompok rentan sangat diperlukan agar intervensi tidak justru memperparah ketidaksetaraan (Cameron & Tedds, 2021).

Berdasarkan sintesis hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerentanan sosial di perkotaan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh dinamika demografis seperti usia, gender, dan struktur rumah tangga yang saling berinteraksi. Ketimpangan sosial di perkotaan tercermin dari pola distribusi bantuan sosial yang sering kali tidak mempertimbangkan

kompleksitas karakteristik penerima, sehingga intervensi yang bersifat seragam cenderung tidak efektif. Misalnya, perempuan lansia yang hidup sendiri atau rumah tangga dengan lansia/disabilitas memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang berbeda dibanding rumah tangga muda berpendapatan rendah. Demikian pula, waktu tunggu yang panjang dalam mengakses layanan publik dan keuangan mempertegas adanya diskriminasi sistemik terhadap kelompok miskin. Maka, kebijakan bantuan sosial di perkotaan harus bersifat sensitif terhadap karakteristik penerima bantuan, berbasis data demografis terpilah, dan dirancang dengan mempertimbangkan dimensi ketimpangan sosial secara menyeluruh.

**c. Peran Teknologi dan Persepsi Masyarakat dalam Penilaian Efektivitas**

Implementasi teknologi dalam tata kelola bantuan sosial telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi layanan, terutama melalui pemanfaatan kerangka kerja data dan platform digital. Studi yang menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi untuk memperbaiki distribusi bantuan sosial melalui teknologi, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam aspek keamanan informasi dan manajemen perubahan organisasi (Endra et al., 2024). Di sisi lain, penerapan sistem identitas digital seperti Aadhaar di India memperlihatkan bagaimana teknologi dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan lokal, yang menjadikan proses penyaluran bantuan lebih tepat sasaran (Madon et al., 2022). Tantangan yang dihadapi mencakup hambatan kelembagaan dan struktur pembiayaan, namun perkembangan seperti pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan mulai diarahkan untuk memperkuat tata kelola sosial, terutama di wilayah-wilayah terpinggir (Sandra, 2022).

Di sisi lain, persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat menjadi elemen kunci dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan program sosial. Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan, seperti yang terlihat dalam program penjangkauan komunitas di Filipina, menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi dan menunjukkan pentingnya pendekatan partisipat (Morong & Lagundi, 2024). Namun,

perbedaan persepsi di kawasan lintas batas seperti Rumania, Moldova, dan Ukraina menandakan bahwa program bantuan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal agar tetap relevan (Tiganasu et al., 2020). Dalam konteks keberlanjutan, studi di Selandia Baru dan Ethiopia menegaskan pentingnya dukungan jangka panjang dan faktor psikososial seperti efikasi diri serta kesetiaan implementasi dalam mempertahankan manfaat program (Whitehead et al., 2023) (Abamecha et al., 2021). Sementara itu, pemanfaatan sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat terbukti meningkatkan keberterimaan dan efektivitas program seperti RUTF di Indonesia (Fetriyuna et al., 2023).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam tata kelola bantuan sosial tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat penerima. Teknologi berperan sebagai fasilitator dalam mempercepat dan mempermudah proses, namun tanpa pemahaman terhadap dinamika lokal dan persepsi masyarakat, efektivitasnya menjadi terbatas. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas program sosial sebaiknya mempertimbangkan integrasi antara inovasi teknologi dengan penerimaan masyarakat, serta mekanisme partisipatif yang memperkuat rasa kepemilikan komunitas terhadap program. Keseimbangan antara pendekatan digital dan humanistik ini menjadi kunci dalam memastikan program bantuan sosial yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak jangka panjang.

#### **D. Kesimpulan**

Efektivitas distribusi bantuan sosial di perkotaan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur kekuasaan, jaringan aktor, dan kerangka kelembagaan yang mengaturnya. Ketimpangan sosial tidak hanya bersumber dari aspek ekonomi, tetapi juga dari faktor demografis seperti gender, usia, dan struktur rumah tangga yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan. Di sisi lain, meskipun teknologi berpotensi meningkatkan efisiensi tata kelola bantuan, keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan sensitivitas terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, pembangunan sistem bantuan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan memerlukan integrasi antara tata kelola yang transparan, pendekatan berbasis data demografis, serta inovasi digital yang inklusif.

### **Kajian Riset Urgen:**

Urgensi riset ke depan terletak pada pengembangan model tata kelola bantuan sosial berbasis data demografis terpilah dan adaptif terhadap dinamika lokal. Kajian mendalam juga diperlukan untuk menilai bagaimana integrasi teknologi dan mekanisme partisipatif dapat memperkuat inklusi sosial serta mengurangi bias dalam distribusi bantuan bagi kelompok rentan di perkotaan.

### **Referensi**

- Abamecha, F., Midaksa, G., Sudhakar, M., Abebe, L., Kebede, Y., Alemayehu, G., & Birhanu, Z. (2021). Perceived sustainability of the school-based social and behavior change communication (SBCC) approach on malaria prevention in rural Ethiopia: stakeholders' perspectives. *BMC Public Health*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11216-7>
- Ahonen, K., & Kuivalainen, S. (2024). Gender differences in old-age poverty in 14 EU countries: exploring the role of household structure. *International Review of Economics*, 71(3), 615–631. <https://doi.org/10.1007/s12232-024-00455-w>
- Angelov, I. (2023). Income Inequality In Relation To Universal Basic Income. *International Journal of Social Science, Technology and Economics Management*, 1(2). <https://doi.org/10.59781/7576utmi>
- Astuti, D., & Sutirman, I. (2024). Analysis of the Effect of Education Fund Budget on Performance Accountability and Transparency in School Fund Management (Cirebon City). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(8), 3143–3156. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i8.10441>
- Berens, S. (2020). Informalization, Social Policy Discontent, and Lack of



- Good Governance. *Latin American Politics and Society*, 62, 1–28.  
<https://doi.org/10.1017/lap.2019.58>
- Bogdan, P. (2022). Budget transparency as an important condition for strengthening the financial self-sufficiency of territorial communities. *Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine*, 34–42.  
<https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-6>
- Cahyandari, R., Ibrahim, R. A., & Yuningsih, S. H. (2024). The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Cibungur Tasikmalaya Village Fund Management. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 2(1), 23–28.  
<https://doi.org/10.46336/ijhlp.v2i1.81>
- Cameron, A., & Tedds, L. M. (2021). Gender-Based Analysis Plus (GBA+) of Two Policy Alternatives: Basic Income and Basic Services. *SSRN Electronic Journal*, 105939. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3781914>
- Endra, R. Y., Rizal, U., & Afandi, F. N. (2024). *Measuring the Maturity Level of Social Assistance Distribution Data Governance Using the 2019 Cobit Framework*. 14(2), 103–108.
- Erlangga, R. S., & Reswan, Y. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penyaluran Bantuan Pemerintah Menggunakan Algoritma Weighted Product. *Jurnal Media Infotama*, 18(1), 56–63.  
<http://dx.doi.org/10.37676/jmi.v18i1.1746%0Ahttps://jurnal.unive>  
[d.ac.id/index.php/jmi/article/download/1746/1664](https://jurnal.unive.ac.id/index.php/jmi/article/download/1746/1664)
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>

- Fathirah, Nirwana, H. (2024). Budget Transparency and Accountability in Local Government. *Jurnal UII*, 3(8.5.2017), 2003–2005.
- Fenuku, Q. (2024). An Examination of Budget Transparency, Accountability and Governance: A Study of Five (5) Sub-Saharan African Countries. *European Modern Studies Journal*, 8(3), 715–729. [https://doi.org/10.59573/emsj.8\(3\).2024.44](https://doi.org/10.59573/emsj.8(3).2024.44)
- Fergus, C. A. (2022). Power across the global health landscape: a network analysis of development assistance 1990-2015. *Health Policy and Planning*, 37(6), 779–790. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac025>
- Fetriyuna, F., Purwestri, R. C., Jati, I. R. A. P., Setiawan, B., Huda, S., Wirawan, N. N., & Andoyo, R. (2023). Ready-to-use therapeutic/supplementary foods from local food resources: Technology accessibility, program effectiveness, and sustainability, a review. *Heliyon*, 9(12), e22478. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22478>
- Fu, Y., & Liu, L. (2023). on the Accessibility of Financial Services and Income Inequality: an International Perspective. *Technological and Economic Development of Economy*, 29(3), 814–845. <https://doi.org/10.3846/tede.2023.18722>
- Goba, N., Gweshengwe, B., Mabaso, A., & Kapungu, F. (2022). The Effectiveness of Poverty Reduction Measures in Peri-Urban Areas of Zimbabwe: Case of Mutasa South Peri-Urban. *Wiś i Rolnictwo*, 1(1 (194)), 57–76. <https://doi.org/10.53098/wir012022/03>
- Holt, S. B., & Vinopal, K. (2023). Examining inequality in the time cost of waiting. *Nature Human Behaviour*, 7(4), 545–555. <https://doi.org/10.1038/s41562-023-01524-w>

- Jung, H. (2022). Online Open Budget: The Effects of Budget Transparency on Budget Efficiency. *Public Finance Review*, 50(1), 91–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/10911421221093412>
- Lain, B. (2022). Between Epistemic Necessity and Political Utility: the Role of Basic Income Experiments. *Journal of Policy Analysis and Management*, 41(2), 633–639. <https://doi.org/10.1002/pam.22384>
- Lee, J. H. (2024). Housing quality determinants of depression and suicide ideation by age and gender. *Housing Studies*, 39(2), 502–528. <https://doi.org/10.1080/02673037.2022.2056151>
- Madon, S., Ranjini, C. R., & Anantha Krishnan, R. K. (2022). Aadhaar and social assistance programming: local bureaucracies as critical intermediary. *Information Technology for Development*, 28(4), 705–720. <https://doi.org/10.1080/02681102.2021.2021130>
- Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024). *Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu*. 13.
- Marselina Saina , Setia, Halim, A. (2020). *Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Malang*. 7(1), 1–10.
- Morong, & Lagundi, C. O. P. S. C. O. P. S. in B. (2024). <div class="csl-entry"><i>Community Outreach Program Sustainability Community Outreach Program Sustainability in Brgy. Lagundi Morong, Rizal. International Research and Innovation Journal, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.62293/IRIJ-191cj
- Naik, A., Nagargoje, M., Patil, V., & Raikar, P. (2024). Budget Transparency and Accountability Platform. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, 9(4), 3288–3306. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24apr977>

- Nasar, S., Raz, S., Parray, A. A., Hossain, M. R., Sultana, R., Nadim, A. S. M., Jabbar, A., Aktar, B., Rashid, S. F., & Rahman, M. S. (2022). An assessment of gender vulnerability in the humanitarian crisis in Cox's Bazar, Bangladesh: Developing a gender-based vulnerability index in the Rohingya and Host community contexts. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 81(August), 103246. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103246>
- Oliveira, amorim, guimaraes. (2023). Centro Unversitário Santo Agostinho. *Directory of Open Access Journals*, 277–297. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12819/2023.20.2.15>
- Potts, A. (2024). *Transforming Gender and Power Dynamics in the Distribution of Humanitarian Aid". In Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping and Aid. Bristol, UK: Bristol University Press. 2024, 1–23.*
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- Sahin, S. B., & Shahin, E. (2020). Aid-supported governance reforms in Solomon Islands: Piecemeal progress or persistent stalemate? *Development Policy Review*, 38(3), 366–386. <https://doi.org/10.1111/dpr.12425>
- Salihi, S., Ignasius Ridwan Hutaauruk, & Hasnarika. (2023). Pengaruh

- Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 769-778. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i6.5778>
- Sandra, P. K. and R. R. and F. O. and. (2022). Digitalisierung als Herausforderung für die Governance sozialer Dienstleistungen – das Beispiel der Sozialen Schuldnerberatung. *Zeitschrift Für Sozialreform. Zeitschrift Für Sozialreform*, 68, 299--327. <https://doi.org/doi:10.1515/zsr-2022-0012>
- Sela, V. M., Gonzalez, L., & Christopoulos, T. P. (2020). Construção da agenda de inclusão financeira à luz da Teoria Ator-Rede. *Revista de Administração Pública*, 54(1), 162-180. <https://doi.org/10.1590/0034-761220180382>
- Simangunsong, H., & Sihotang, D. (2023). The Impact of Economic Conditions on Social Assistance Programs and Poverty Alleviation. *Law and Economics*, 17(2), 73-91. <https://doi.org/10.35335/laweco.v17i2.2>
- Supriyatno, Y., & Maulana, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *Governance*, 10(2), 34-48. <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5638>
- Tiganasu, R., Jijie, T. D., & Kourtiti, K. (2020). Effectiveness and impact of cross-border cooperation programmes in the perception of beneficiaries. Investigation of 2007-2013 Romania-Ukraine-Moldova programmes. *Regional Science Policy and Practice*, 12(5), 861-885. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12342>

- van der Meer, L., Barsties, L. S., Daalderop, L. A., Waelput, A. J. M., Steegers, E. A. P., & Bertens, L. C. M. (2022). Social determinants of vulnerability in the population of reproductive age: a systematic review. *BMC Public Health*, 22(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13651-6>
- Whitehead, L., Barraclough, S., & Tarren-Sweeney, M. (2023). Foster carers' perceptions of the long-term effectiveness of the Fostering Changes programme. *Journal of Family Therapy*, 45(2), 138–153. <https://doi.org/10.1111/1467-6427.12416>
- Wilson, E. J., Jayanthakumaran, K., & Verma, R. (2022). Urban poverty, growth, and inequality: A needed paradigm shift? *Review of Development Economics*, 26(2), 941–961. <https://doi.org/10.1111/rode.12866>
- Wiswadas, W., Sobri, K. M., Alfatih, A., & Alamsyah, A. (2023). Accountability, Transparency, and Employee Performance in Organizational Asset Management in Buddhist Religious Organizations: Evidence from the Regional Office of the Ministry of Religion of South Sumatra Province. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 11(1), 49–58. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v11i1.9251>
- Yang, R., Zhong, C., Yang, Z., & Wu, Q. (2022). Analysis on the Effect of the Targeted Poverty Alleviation Policy on Narrowing the Urban-Rural Income Gap: An Empirical Test Based on 124 Counties in Yunnan Province. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912560>
- Zhao Taotao. (2023). Governance Challenge and Tiered State Assistance:

The Fiscal Gap in the Chinese Ethnic Tibetan Autonomous Areas.

*Journal of Contemporary China*, 32, 1000–1016.

<https://doi.org/10.1080/10670564.2023.2193156>